

Editorial :
HERMAWAN SULISTYO
ERWIN SUGIARTO

meniti partisipasi publik

Heri Wardoyo
Tisnanta
Nanang Trenggono
Siti Noor Laila
Masyhuri Abdullah dan Yudas Ermadi



KBN Lampung



The Ford Foundation

Pensil-324

meniti partisipasi publik

Penulis

Heri Wardoyo

Tisnanta

Nanang Trenggono

Siti Noor Laila

Masyhuri Abdullah dan Yudas Ermadi

Editor

Hermawan Sulistyio

Erwin Sugiarto

Desain Sampul dan Tata Letak

Roland Johansen

Cetakan Pertama, November 2003

ISBN: 797-3622-03-2

Penerbit

Kantor Bantuan Hukum (KBH) Lampung

Jl. Letjend. Suprpto No. 54/78 Pelita,
Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung 35117

Telp/fax. (0721) 267 965

Telp. (0721) 241 419

E-mail: kbh-lpg@indo.net.id

diterbitkan atas kerjasama KBH Lampung dengan Pensil-324 atas dukungan The Ford Foundation

Pencetak

Pensil-324, Jakarta

PARTISIPASI publik penting dalam menuju negara demokratis. M... normatif penting da... masyarakat sipil sebagai... adalah untuk mengaku... kemampuan politik pu... akhir ini muncul dal... bahwa politik modern... yang signifikan dalam... kelompok-kelompok d...

Di Indonesia (bangs... *builangnya* belum seles... partisipasi publik menja... publik ini pun beragam... dan daya ekonomi poli...

Jika ditilik dari reali... banyak hal yang bisa di... ruang publik. Pers y... kesempatan luas untuk... kepentingan publik de... partai politik yang dibis... menjadi faktor strateg... transformasi politik, da... politisi melalui partai da... yang menjadi potensi... politik (*political society*)... struktur politik yang de...

BAGIAN KETIGA

**KETERBUKAAN DAN DINAMIKA
INTERNAL GERAKAN PARTISIPATIF
MASYARAKAT SIPIL DI LAMPUNG**

Oleh: Drs. Nanang Trenggono, M.Si

KETERBUKAAN DAN DINAMIKA INTERNAL GERAKAN PARTISIPATIF MASYARAKAT SIPIL DI LAMPUNG

Oleh Drs. Nanang Trenggono, M.Si

LIMA tahun setelah gerakan reformasi Mei 1998, muncul pandangan-pandangan evaluatif terhadap gerakan *civil society* (masyarakat sipil) di Lampung. Sejauhmanakah kemajuan yang kita capai dengan reformasi? Sejauhmanakah penguatan partisipasi masyarakat sipil? Sejauhmanakah gerakan masyarakat sipil mampu mendorong kebijakan publik yang berbasis kepentingan rakyat? Dalam hal ini, setidaknya ada dua kecenderungan jawaban.

Pertama, pandangan pesimis yang tidak terlalu yakin bahwa gerakan massa mampu membuat perubahan. Mereka memandang bahwa transisi politik ekonomi sosial terlihat berkepanjangan. Meskipun dari kelompok ini juga belum ada tawaran pemikiran solusif. *Kedua*, pandangan optimis yang melihat sudah ada perkembangan positif hasil dari gerakan reformasi yakni pergeseran pola partisipasi dari pemikiran radikalisme menuju masyarakat sipil, yakni pola partisipasi yang spontan bergeser pada pola partisipasi yang terprogram dan terorganisasi.¹

Untuk membahas proses politik di Lampung, tulisan berikut menggabungkan dua pandangan di atas secara bergantian, terutama dalam kaitannya dengan tema membuka ruang partisipasi publik. Meskipun sebenarnya, dua pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat sebagai pisau analisis.

lei 1998, muncul gerakan *civil society* ah kemajuan yang takah penguatan anakah gerakan akan publik yang ni, setidak-tidaknya

erlalu yakin bahwa abahan. Mereka omi sosial terlalu ini juga belum ada gan optimis yang hasil dari gerakan isi dari pemikiran ni pola partisipasi i yang terprogram

Lampung, tulisan an di atas secara an tema membuka nya, dua pandangan isau analisis.

L. Tantangan Bagi Partisipasi

Partisipasi politik merupakan wacana yang dianggap penting. Di sini partisipasi diletakkan dalam konteks peran dan aktivitas publik untuk mempengaruhi keputusan-keputusan politik. Seperti dikutip Miriam Budiarjo, 1998, dari pendapat Huntington dan Nelson: *By political participation we mean activity private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective* (Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif).²

Dengan demikian jelas bahwa partisipasi politik tidak dimaksudkan hanya semata-mata sebagai aktivitas publik yang dilakukan oleh partai politik. Bahkan termasuk dalam partisipasi politik adalah tindakan-tindakan individual dalam kapasitas seseorang sebagai warga negara untuk mempengaruhi keputusan politik.

Dalam praktik, setelah gerakan reformasi, ruang partisipasi publik semakin terbuka. Dan berbagai persoalan masyarakat yang sebelumnya bisa dibungkam melalui kekuatan represi militer sekarang bermunculan di mana-mana. Masyarakat menuntut agar berbagai problem mereka dapat diselesaikan secara adil. Bila kita cermati ruang publik yang terbuka merupakan fenomena yang masih belum memberikan kepastian bagi berkembangnya partisipasi politik warga yang efektif, mengingat instrumen politik dan hukum yang diperlukan untuk tumbuhnya demokrasi belum berubah.

Undang-undang partisipasi, akses informasi publik, transparansi pelaksana negara, semuanya belum konkrit disusun oleh para pemegang kekuasaan dari Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Salah satunya kebijakan politik yang memberi peluang adalah Undang-Undang Otonomi Daerah, tetapi di dalamnya tidak ada yang mengatur secara spesifik dan rinci tentang partisipasi politik warga di tingkat lokal. Demikian pula di Lampung tidak muncul inisiatif dari para politisi untuk merancang peraturan daerah yang mengatur perihal aspek-aspek partisipasi publik. Paling tidak ada dua faktor utama yang menyebabkan kondisinya seperti ini, bila dilihat dari sisi para pengambil keputusan publik, yakni pemerintah dan partai politik.

Pertama, persepsi negatif pejabat-pejabat terhadap berbagai aktivitas partisipatif masyarakat. Pemahaman negatif ini adalah masih diletakkannya pemahaman partisipasi dalam kerangka mobilisasi keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi dalam kerangka kontrol sosial dikategorikan sebagai perlawanan atau pembangkangan terhadap pemerintah.

Pemahaman inipun masih dianut oleh sebagian besar politisi, yang sangat sensitif bila terjadi aksi-aksi publik yang disampaikan pada lembaga politik. Selalu muncul pertanyaan-pertanyaan seperti siapa yang membiayai aksi, dibayar berapa peserta aksi, atau untuk kepentingan siapa. Relatif kecil politisi yang memiliki kemampuan politik memadai untuk menanggapi tuntutan warga secara substansial.

Respon negatif para pejabat publik tidak signifikan dalam perjuangan membangun demokratisasi, apalagi bila persoalannya sudah merembet pada tanggapan tidak simpatik dari masyarakat umum lainnya, maka suatu gerakan massa mudah dibelokkan dengan berbagai isu yang melemahkan aksi massa, seperti memacetkan lalu lintas jalan raya, merusak fasilitas umum, merepotkan ibu-ibu yang berbelanja, merugikan kepentingan umum dan lain-lain. Pada titik ini

demokrasi
dibebaskan oleh
sosial kerakyatan

Kedua, posisi c
modern yang seh
namun peran in
sifatnya muncul
seder, pemimpin,
negatif masyara
menjauhkan kebe
sifatnya, resisten
aksi balik yang
aktivitas sosial yan

Bila relasi partai
terak maka part
masyarakat untuk
aspirasi. Peran par
ngan non-peme:
mendampingi kepe

II. Evaluasi Kritis

Periode awal sar
sosial di Lampung d
masa. Pemikiran g
Marx, Lenin dan v
tertuk kelompok
sembunyi-sembunyi

Lalu, pada akhir
otonomi yang dise
gerakan politik t
menjatuhkan rezim
yang dimotori kelas t
yang ditengarai And
demokrasi muslim

formasi publik. a belum konkrit n dari Habibie, karnoputri. Satu- peluang adalah di dalamnya tidak tentang partisipasi di Lampung tidak rancang peraturan partisipasi publik. g menyebabkan i para pengambil artai politik.

terhadap berbagai negatif ini adalah si dalam kerangka m pembangunan ategorikan sebaga o pemerintah.

h sebagian besar si-aksi publik yang muncul pertanyaan-ksi, dibayar berapa. Relatif kecil politis memadai untuk nsial.

ik signifikan dalam asi, apalagi bila pan tidak simpatik itu gerakan massa g melemahkan aks lan raya, merusah yang berbelanja lain. Pada titik in

kemunduran demi kemunduran praktik demokrasi akan terus dihembuskan oleh pihak-pihak yang anti terhadap gerakan sosial kerakyatan.

Kedua, posisi dan peran partai sebagai organisasi politik modern yang seharusnya menyalurkan kepentingan publik, namun peran ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap kader, pemimpin, bahkan organisasi politik ini. Penilaian negatif masyarakat terhadap partai politik semakin menjauhkan keberadaan partai politik dengan masyarakat. Akibatnya, resistensi negatif masyarakat akan menimbulkan aksi balik yang negatif pula dari partai politik terhadap aktivitas sosial yang disampaikan masyarakat.

Bila relasi partai politik dengan masyarakatnya sedemikian buruk maka partai politik tidak lagi menjadi alternatif masyarakat untuk menyampaikan keluhan, tuntutan, dan aspirasi. Peran partai politik akan diambil alih oleh organ-organ non-pemerintah yang mampu menampung dan mendampingi kepentingan masyarakat luas.

II. Evaluasi Kritis

Periode awal sampai dengan pertengahan 1990an gerakan sosial di Lampung dimulai dengan gagasan radikalisme gerakan massa. Pemikiran gerakan didasarkan pada teori-teori kritis Marx, Lenin dan variannya. Pola gerakan dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok studi kritis yang berjalan sembunyi-sembunyi.

Lalu, pada akhir periode 1990an di Lampung, krisis ekonomi yang disertai krisis politik, telah memunculkan gerakan politik terbuka yang terkonsentrasi untuk menjatuhkan rezim Orba. Elemen-elemen oposisi perlawanan yang dimotori kelas menengah juga lahir dari Lampung, seperti yang ditengarai Anders Uhlin, 1997, misalnya aktivis-aktivis pro-demokrasi muslim, aktivis gerakan populis berbasis wacana